

**BAB**

**II**

**GAMBARAN PELAYANAN  
PERANGKAT DAERAH**



**RENSTRA  
KECAMATAN WINONG  
KABUPATEN PATI**

2017 - 2022

## BAB II

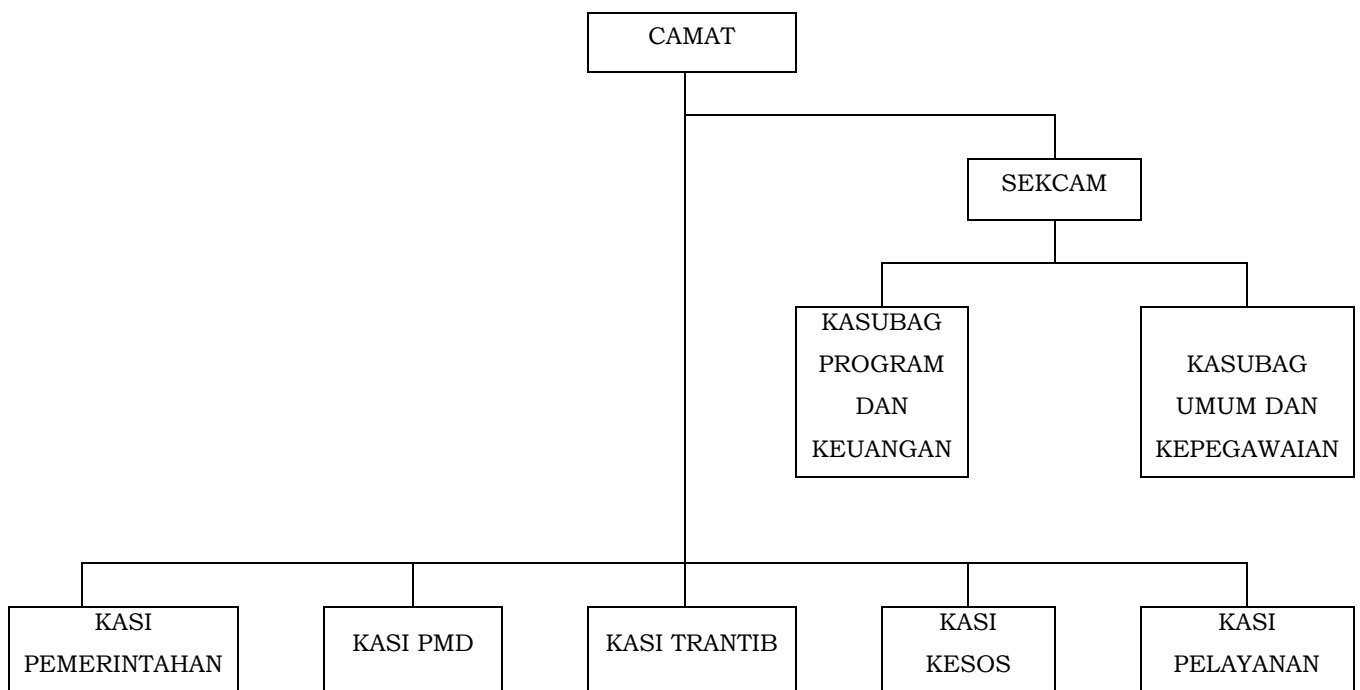
### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Winong

##### 2.1.1. Struktur Organisasi Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, susunan organisasi Kecamatan Winong terdiri atas:

#### STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK) KANTOR KECAMATAN WINONG KABUPATEN PATI



#### Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Winong

##### 2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tugas Kecamatan terdiri atas :

- menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
- mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;

- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Kecamatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
- d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- j. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Di Kabupaten Pati, berdasarkan Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati nomor 63 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, berikut disajikan kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan.

**Tabel II.1.**  
**Urusan yang Dilimpahkan Bupati Kepada Kecamatan**

<b>No</b>	<b>Aspek</b>	<b>Kewenangan yang Dilimpahkan</b>
<b>1</b>	Aspek Rekomendasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekomendasi, pencatatan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan lahan bekas jalan kali mati.</li> <li>- Rekomendasi dan pengawasan ijin pendaftaran Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang social, organisasi social/panti social, pengumpulan uang di lingkup Kecamatan.</li> <li>- Rekomendasi pemberian Surat Keterangan domisili kantor/ usaha industri.</li> <li>- Rekomendasi pemberian ijin usaha, pengawasan dan pelaporan tempat usaha pelatihan kerja.</li> <li>- Rekomendasi pemberian ijin keramaian, ijin gangguan, ijin usaha dan ijin mendirikan bangunan.</li> <li>- Rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa yang diajukan oleh Pemerintah Desa di Wilayahnya.</li> <li>- Rekomendasi pencairan Bantuan Keuangan berupa tambahan penghasilan aparat pemerintah desa dan bantuan keuangan bagi anggota badan permusyawaratan desa dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa</li> </ul>

		lainnya yang diajukan oleh pemerintah desa di wilayahnya.
<b>2</b>	Aspek Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai proses pelaksanaan pendaftaran di desa dan kelurahan sesuai kerja Camat.</li> <li>- Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai pelaporan data kependudukan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Desa dan Kelurahan sesuai wilayah kerja Camat.</li> <li>- Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kecamatan.</li> <li>- Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala kecamatan.</li> <li>- Koordinasi dan pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas) di wilayah kerjanya.</li> <li>- Koordinasi dan fasilitasi proses/kegiatan pengisian perangkat desa dan pemilihan kepala desa.</li> <li>- Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.</li> </ul>
<b>3</b>	Aspek Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.</li> <li>- Pembinaan, pengawasan, fasilitasi Badan Permusyawaratan Desa skala Kecamatan.</li> <li>- Pembinaan, koordinasi, pengawasan dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kecamatan.</li> <li>- Pembinaan terhadap kinerja aparat pemerintahan desa baik kepala desa maupun perangkat desa termasuk staf perangkat desa.</li> </ul>

4	Aspek Penyelenggaraan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melantik keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa di wilayah kerja Kecamatan.</li> <li>- Legalisasi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)</li> <li>- Meresmikan keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa di wilayah kerja Kecamatan.</li> <li>- Memberhentikan anggota Badan Permasyarakatan Desa di wilayah kerja Kecamatan.</li> <li>- Mengambil sumpah/janji anggota Badan Permasyarakatan Desa di wilayah kerja Kecamatan.</li> <li>- Menerbitkan Keputusan mengenai pengangkatan anggota Badan Permasyarakatan Desa di wilayah kerja Kecamatan.</li> <li>- Menerbitkan Keputusan mengenai pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa dan pengesahan anggota Badan Permasyarakatan Desa antar waktu desa di wilayah kerjanya.</li> <li>- Evaluasi Peraturan Desa tentang APBDes.</li> <li>- Pembentukan satuan relawan kebakaran (Satlakar) di tiap Kecamatan.</li> <li>- Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa ijin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup.</li> <li>- Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah Negara, bebas dan tanah timbul di wilayah kerjanya.</li> <li>- Pendataan ketenagakerjaan di wilayah kerjanya.</li> <li>- Pengusulan penetapan nama-nama geografi.</li> </ul>
---	-----------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengusulan penetapan batas wilayah Kecamatan dan batas wilayah antar kelurahan.</li> <li>- Pelaksanaan lomba desa/kelurahan tingkat kecamatan.</li> <li>- Koordinator pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pembinaan administrasi pungutan PBB pedesaan dan perkotaan.</li> <li>- Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.</li> <li>- Pemungutan Pajak Daerah di luar surat ketetapan Pajak daerah (SKPD).</li> </ul>
--	---

Sumber: Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013

**Tabel II.2.**

**Kewenangan Program dan Kegiatan PD yang Dilimpahkan Kepada Kecamatan**

No	Urusan dan PD yang melimpahkan	Program dan Kegiatan yang dilimpahkan
1	Dinas Koperasi dan UMKM	Pelaksanaan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Perizinan IMB, SIUP bagi usaha mikro, TDP bagi usaha mikro, Pengumpulan Dana dan penutupan jalan.
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pembuatan KTP, KK, Surat Pindah, Surat Keterangan pengganti KTP.

Sumber: Sekretariat Kecamatan Winong, 2016

## 2.2 Sumber Daya Kecamatan

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia

Pegawai Kecamatan Winong berjumlah 17 orang, terdiri dari 12 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 5 orang Tenaga Harian Lepas (THL). Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel II.3**

**Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan**

No	Uraian	Eselon III		Eselon IV		Staf		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	Jml	%
		<b>1</b>	<b>Kecamatan Winong</b>	<b>2</b>		<b>5</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
	- Camat	1							
	- Sekcam	1							
	- Kasubag Program & Keu			1					
	- Kasubag Umum & Kepeg								
	- Kasi PMD			1					
	- Kasi Trantib			1					
	- Kasi Kesos			1					
	- Kasi Pelayanan				1				
	- Kasi Pemerintahan			1					
	- Staf Pemerintahan					1	2		
	- Staf Subbag Umum & Kep					1			
	- Staf Subbag Program & Keu					1	2		
	- Satpol PP					2			

Sumber: Sekretariat Kecamatan Winong, 2016

**Tabel II.4**

**Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan**

No	Uraian	<SLT P		SLTA		Diplo ma		S1		S2<		Jumlah (%)	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
		<b>1</b>	<b>Kecamatan Winong</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	
	- Camat							1					
	- Sekcam			1									



-Kasubag Program & Keu					1	
-Kasubag Umum & Kepeg						
- Kasi PMD					1	
- Kasi Trantib					1	
- Kasi Kesos					1	
-Kasi Pelayanan					1	
-Kasi Pemerintahan					1	
-Staf Pemerintahan						
-Staf Subbag Umum & Kep					1	
-Staf Subbag Program & Keu				1	1	1
- Satpol PP	1	1				

Sumber: Sekretariat Kecamatan Winong, 2016

### 2.2.2. Sarana dan Prasarana Kerja

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan.

**Tabel II.5**  
**Sarana Prasarana Kecamatan**

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Kondisi Saat ini	Keterangan
1	Gedung	2	unit	Kurang Baik	
2	Ruangan	2	Ruangan	Kurang Baik	
3	Kendaraan roda 4	1	unit	Baik	2012
4	Kendaraan roda 2	8	unit		
		3	unit	Baik	

	5	unit	Kurang Baik
peralatan kerja :		unit	
<b>5</b> - Komputer	4	unit	3 baik, 1 kurang baik
<b>6</b> - Laptop	3	unit	baik
<b>7</b> - Printer	6	unit	3 baik, 2 kurang baik, 1 rusak
<b>8</b> - Meja	24	unit	21 baik, 3 kurang baik
<b>9</b> - Kursi	28	unit	24 baik, 4 kurang baik
<b>10</b> - AC	1	unit	Kurang baik
<b>11</b> - Almari	4	unit	3 baik, 1 kurang baik
<b>12</b> - Filling cabinet	8	Unit	5 baik, 3 kurang baik

*Sumber: Sekretariat Kecamatan Winong, 2016*

Mengingat jumlah aparatur kecamatan yang menduduki jabatan struktural sebanyak 9 orang dan petugas PBB 1 orang sementara kendaraan operasional yang tersedia sebanyak 9 unit termasuk mobil maka kedepan pemerintah kecamatan masih membutuhkan penambahan kendaraan operasional sebanyak 5 unit dikarenakan 1 unit motor untuk pejabat yang belum dapat motor dan 4 unit motor untuk penggantian motor yang sudah kurang baik.

Kondisi jumlah komputer di Kecamatan Winong saat ini sebanyak 4 unit dengan 3 dalam kondisi baik dan 1 kondisi kurang baik, maka kedepan masih membutuhkan penambahan komputer sebanyak 3 unit lagi untuk pelayanan dan penggantian komputer yang kurang baik.

Kondisi jumlah Laptop di Kecamatan Winong saat ini sebanyak 3 unit dengan 3 dalam kondisi baik, mengingat pejabat struktural sebanyak 9 orang dan 2 untuk simda keuangan dan simda BMD (aset) maka kedepan masih membutuhkan penambahan laptop sebanyak 8 unit lagi untuk 9 pejabat.

Kondisi jumlah printer di Kecamatan Winong saat ini sebanyak 6 unit dengan 3 dalam kondisi baik, 2 kondisi kurang baik dan 1 kondisi rusak,

maka ke depan masih membutuhkan penambahan printer sebanyak 8 unit lagi untuk pelayanan dan penggantian printer yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah meja di Kecamatan Winong saat ini sebanyak 24 unit dengan 21 dalam kondisi baik dan 3 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan meja sebanyak 8 unit lagi untuk pelayanan dan penggantian meja yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah kursi di Kecamatan Winong saat ini sebanyak 28 unit dengan 24 dalam kondisi baik dan 4 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan kursi sebanyak 50 unit lagi untuk pelayanan dan penggantian kursi yang kurang baik dan rusak serta persiapan pemakaian gedung baru.

Kondisi jumlah AC di Kecamatan Winong saat ini sebanyak 1 unit dengan kondisi baik, , maka ke depan masih membutuhkan penambahan AC sebanyak 15 unit lagi karena adanya Pembangunan gedung baru bagi kecamatan Winong.

Kondisi jumlah almari di Kecamatan Winong saat ini sebanyak 4 unit dengan 3 dalam kondisi baik dan 1 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan almari sebanyak 5 unit lagi untuk tempat arsip dan penggantian almari yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah filling cabinet di Kecamatan Winong saat ini sebanyak 8 unit dengan 5 dalam kondisi baik dan 3 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan filling cabinet sebanyak 10 unit lagi untuk pejabat struktural yang belum punya filing cabinet dan penggantian filing cabinet yang kurang baik dan rusak.

### **2.2.3. Kondisi umum Kecamatan Winong**

#### **2.2.3.1. Kondisi Kewilayahan**

Kecamatan Winong terletak di sebelah tenggara Kabupaten Pati. Sebagian wilayahnya berada di pegunungan kapur utara. Luas Wilayah Kecamatan Winong 9993.9 Ha, sedangkan ketinggian wilayah kecamatan Winong terendah 8 m diatas permukaan laut dan tertinggi 120 m dari permukaan laut, dengan rata - rata ketinggian tempat kurang lebih 16 m diatas Permukaan laut. Wilayah kecamatan Winong terdiri dari 30 Desa yang membujur dari utara ke selatan. Kecamatan Winong juga dikenal sebagai salah satu pusat pendidikan di Kabupaten Pati.

Batas batas wilayah Kecamatan winong yaitu :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Jakenan
  - Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pucakwangi
  - Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tambakromo dan kabupaten Grobogan
  - Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Gabus.
- Dibagian selatan dibatasi oleh pegunungan Kapur Utara yang memisahkan Kabupaten pati dengan kabupaten Grobogan



Peta Kecamatan Winong

Kawasan perencanaan yang menjadi lingkup kerja Kecamatan Winong dapat dilihat dalam tabel II.6 berikut ini :

**Tabel II.6**  
**Kawasan Perencanaan di Lingkup Kecamatan Winong**

NO	DESA	Luas Wiyah	Jumlah RW	Jumlah RT	Peruntukan Kawasan Pengembangan Khusus menurut RTRW Kab. Pati
1	2				
1	Pohgading	1035,90	2	11	
2	Gunungpanti	1082,08	4	18	
3	Godo	951,41	3	27	
4	Kropak	261,20	3	21	
5	Karangsumber	870,29	3	15	
6	Guyangan	772,74	3	15	
7	Sugihan	156,60	3	15	
8	Kebolampang	222,56	2	9	
9	Tlogorejo	202,77	2	16	
10	Pagendisan	211,07	3	15	
11	Pekalongan	198,97	2	14	
12	Danyangmulyo	400,00	3	16	
13	Kudur	207,69	3	16	
14	Padangan	240,01	2	10	
15	Blingijati	158,49	2	10	
16	Mintorahayu	254,06	3	12	
17	Kebowan	188,04	1	8	
18	Winong	186,16	3	22	
19	Klecoregonang	110,22	3	10	
20	Bumiharjo	226,28	4	22	
21	Tawangrejo	245,79	7	30	
22	Bringinwareng	135,00	2	9	
23	Sumbermulyo	287,43	3	26	
24	Degan	169,88	2	12	

25	Serutsadang	114,73	2	9	
26	Pulorejo	144,28	2	16	
27	Karangkonang	162,70	2	14	
28	Tanggal	206,52	2	16	
29	Wirun	176,54	2	16	
30	Sarimulyo	414,50	4	22	
	<b>JUMLAH</b>	<b>9993,91</b>	<b>82</b>	<b>472</b>	

*Sumber: Kecamatan Winong dalam angka 2016*

#### 2.2.3.2. Keadaan penduduk

Kecamatan Winong memiliki jumlah penduduk sebanyak 50.007 jiwa, yang terdiri dari 22.023 jiwa laki-laki dan 27.294 jiwa perempuan. Jumlah kepala keluarga (KK) di Kecamatan Winong tahun 2016 berjumlah 16.257 KK. Berdasarkan data kependudukan dari kecamatan pada tahun 2016 yang dilihat kepadatan penduduk sebesar 6,25 jiwa per hektar. Profil kependudukan Kecamatan Winong digambarkan melalui tabel berikut :

**Tabel II.7**

#### **Jumlah Penduduk menurut Struktur Umur di Kecamatan Winong**

No	Kelompok Umur	L	%	P	%	jumlah	%
1	0-4	1.977	51,8	1.842	48,2	3.819	100
2	5-9	2.059	50,4	2.025	49,6	4.084	100
3	10-14	2.173	49,7	2.198	50,3	4.371	100
4	15-19	1.761	46,8	2.000	53,2	3.761	100
5	20-24	1.097	37,0	1.864	63,0	2.961	100
6	25-29	1.158	38,6	1.841	61,4	2.999	100
7.	30-34	1.116	38,7	1.769	61,3	2.885	100
8	35-39	1.319	41,1	1.892	58,9	3.211	100
9	40-44	1.287	41,2	1.837	58,8	3.124	100
10	45-49	1.485	42,7	1.989	57,3	3.474	100
11	50-54	1.523	43,5	1.978	56,5	3.501	100
12	55-59	1.499	47,3	1.668	52,7	3.167	100
13	60-64	1191	45,1	1.452	54,9	2.643	100
14	65-69	925	44,5	1154	55,5	2.079	100
15	70-74	678	39,1	1057	60,9	1.735	100
16	75+	775	35,3	1418	64,7	2.193	100
17	<b>Jumlah</b>	<b>22.023</b>	<b>44,0</b>	<b>27.984</b>	<b>56,0</b>	<b>50.007</b>	<b>100</b>

Sumber: Kecamatan Winong dalam angka 2016

Sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan di Kecamatan Winong sebagai berikut

**Tabel II.8**

**Jumlah Penduduk menurut Pendidikan di Kecamatan Winong**

No	Pendidikan	L	P	jumlah	%
1	Belum sekolah	5.656	6.141	11.797	18,9
2	Belum tamat SD/MI	3.453	3.610	7.063	11,33
3	SD/MI	10.759	11.013	21.772	34,94
4	SMP/MTs	5.460	5.347	10.807	17,3
5	SMA/SMK/MA	4.386	4.336	8.722	14
6	DI/DII	123	167	290	0,47
7	DIII	161	288	449	0,7
8	S1	668	683	1.351	2,17
9	S2	40	22	62	0,1
10	S3	5	1	6	0,0

Sumber: Data Dispendukcapil Kabupaten Pati, 2016

Profil penduduk menurut jenis pekerjaan di Kecamatan Winong sebagai berikut

**Tabel II.9**

**Profil Penduduk menurut Jenis Pekerjaan di Kecamatan Winong**

No	Jenis Pekerjaan	L	P	jumlah	%
1	Belum/tidak bekerja	6.520	6.140	12.660	20,31%
2	Mengurus rumah tangga	3	6.607	6.610	10,61%
3	Pelajar/mahasiswa	4.630	4.378	9.008	14,45%
4	Pensiunan	144	54	198	0,32%
5	PNS	299	189	488	0,78%
6	TNI	28	0	28	0,04%
7	Polri	83	5	88	0,14%
8	Pedagang	70	134	204	0,33%
9	Petani/pekebun	7.014	6.876	13.890	22,29%
10	Peternak	6	4	10	0,02%
11	Nelayan	6	0	6	0,05%
12	Industri	9	25	34	0,05%
13	Konstruksi	7	0	7	0,01%
14	Transportasi	8	2	10	0,02%
15	Karyawan swasta	766	644	1.410	2,26%
16	Karyawan BUMN	32	11	43	0,07%
17	Karyawan BUMD	14	8	22	0,04%
18	Karyawan Honorer	36	37	73	0,12%
19	Buruh harian lepas	2	2	4	0,01%

20	Buruh tani	0	23	23	0,04%
21	Wiraswasta	2	0	2	0,00%

Sumber: Data Dispendukcapil Kabupaten Pati, 2016

Profil penduduk menurut agama di Kecamatan Winong sebagai berikut:

**Tabel II.11**

**Profil Penduduk menurut Jenis Agama di Kecamatan Winong**

No	Agama	L	P	jumlah	%
1	Islam	30.555	31.421	61.976	99,5
2	Kristen	145	179	324,0	0,52
3	Katolik	11	6	17,0	0,03
4	Hindu	0	1	1	0,0
5	Budha	0	0		0,0
6	Konghuchu	0	0		0,0
7	Aliran Kepercayaan	0	1	1	0,0

Sumber: Data Dispendukcapil Kabupaten Pati, 2016

## 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan

### 2.3.1. Kinerja Pelayanan

Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 221 dan pasal 226, serta Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 50 menyebutkan bahwa Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan: koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati, yang menjadi batasan area pengukuran kinerja pelayanan kecamatan. Kewenangan kecamatan juga ditambahkan berdasarkan Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati nomor 63 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati. Dengan demikian kinerja pelayanan Kecamatan Winong didasarkan pada tugas dan fungsi dan pelimpahan kewenangan tersebut.

A. Mewujudkan masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah Kecamatan

1. Angka Kriminalitas



Salah satu tugas kecamatan yaitu mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum. Terkait dengan angka kriminalitas yang terjadi di Kecamatan Winong dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Jenis Kriminal	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah kasus narkoba				0	0	0
2	Jumlah kasus pembunuhan				0	0	0
3	Jumlah kejahatan seksual				0	0	0
4	Jumlah kasus penganiayaan				0	0	4
5	Jumlah kasus pencurian				0	0	6
6	Jumlah kasus penipuan				0	0	0
7	Jumlah kasus pemalsuan uang						0
8	Jumlah tindak kriminal selama 1 tahun				0		0
9	Jumlah penduduk				0	0	50.007
10	Angka kriminalitas (8)/(9)				0	0	

## 2. Posko Keamanan Lingkungan (Poskamling).

Terkait dengan ketersediaan Posko Keamanan Lingkungan (Poskamling) di Kecamatan Winong dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Desa	Poskamling		
		Aktif	Tidak Aktif	Jumlah
1	Pohgading	Na	Na	
2	Gunungpanti	Na	Na	
3	Godo	Na	Na	

4	Kropak	Na	Na	
5	Karangsumber	Na	Na	
6	Guyangan	Na	Na	
7	Sugihan	Na	Na	
8	Kebolampang	Na	Na	
9	Tlogorejo	Na	Na	
10	Pagendisan	Na	Na	
11	Pekalongan	Na	Na	
12	Danyangmulyo	Na	Na	
13	Kudur	Na	Na	
14	Padangan	Na	Na	
15	Blingijati	Na	Na	
16	Mintorahayu	Na	Na	
17	Kebowan	Na	Na	
18	Winong	Na	Na	
19	Klecoregonang	Na	Na	
20	Bumiharjo	Na	Na	
21	Tawangrejo	Na	Na	
22	Bringinwareng	Na	Na	
23	Sumbermulyo	Na	Na	
24	Degan	Na	Na	
25	Serutsadang	Na	Na	
26	Pulorejo	Na	Na	
27	Karangkonang	Na	Na	
28	Tanggal	Na	Na	
29	Wirun	Na	Na	
30	Sarimulyo	Na	Na	
	Jumlah	Na	Na	

### 3. Perlindungan Masyarakat (Linmas).

Terkait dengan keberadaan anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kecamatan Winong dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Desa	Anggota Linmas		
		Aktif	Tidak Aktif	Jumlah
1	Pohgading	16	-	16
2	Gunungpanti	26	-	26

<b>3</b>	Godo	26	-	26
<b>4</b>	Kropak	26	-	26
<b>5</b>	Karangsumber	26	-	26
<b>6</b>	Guyangan	20	-	20
<b>7</b>	Sugihan	20	-	20
<b>8</b>	Kebolampang	26	-	26
<b>9</b>	Tlogorejo	26	-	26
<b>10</b>	Pagendisan	22	-	22
<b>11</b>	Pekalongan	26	-	26
<b>12</b>	Danyangmulyo	26	-	26
<b>13</b>	Kudur	26	-	26
<b>14</b>	Padangan	22	-	22
<b>15</b>	Blingijati	19	-	19
<b>16</b>	Mintorahayu	26	-	26
<b>17</b>	Kebowan	26	-	26
<b>18</b>	Winong	26	-	26
<b>19</b>	Klecoregonang	22	-	22
<b>20</b>	Bumiharjo	29	-	29
<b>21</b>	Tawangrejo	26	-	26
<b>22</b>	Bringinwareng	20	-	20
<b>23</b>	Sumbermulyo	29	-	29
<b>24</b>	Degan	20	-	20
<b>25</b>	Serutsadang	20	-	20
<b>26</b>	Pulorejo	23	-	23
<b>27</b>	Karangkonang	19	-	19
<b>28</b>	Tanggal	20	-	20
<b>29</b>	Wirun	22	-	22
<b>30</b>	Sarimulyo	22	-	22
	Jumlah	703	-	703

Evaluasi capaian kinerja pelayanan kecamatan Winong periode 2012-2017 sebagai berikut.

**Tabel II.14**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN WINONG**  
**KABUPATEN PATI**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Angka Kriminalitas		4,8		6	5,8	5,5	5,4	4,8	6,2	5,95	5,76	5,53	4,84	1,03	1,03	1,05	1,02	1,01
2	Jumlah pos kampling aktif dibagi jumlah pos kampling yang ada x 100%		60		46	50	54	57	60	44	48	52	55	58	0,96	0,96	0,96	0,96	0,97
3	Jumlah anggota Linmas aktif dibagi jumlah anggota Linmas yang ada x 100%		56		42	45	50	53	56	41	44	47	52	55	0,98	0,98	0,94	0,98	0,98
4	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berprestasi		45		25	30	35	40	45	22	26	30	35	40	0,88	0,87	0,86	0,88	0,89
5	Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat		100		94	96	98	100	100	93	94	95	98	100	0,99	0,98	0,97	0,98	1,00
6	Persentase usulan masyarakat yang masuk dalam APBD Kabupaten		5		1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	0,00	0,50	0,67	0,75	0,80
7	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif		40		25	27	30	35	40	20	22	24	27	30	0,80	0,81	0,80	0,77	0,75

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
8	Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.		100		95	98	98	100	100	93	94	95	98	100	0,98	0,96	0,97	0,98	1,00
9	Persentase usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten		5		1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	0,00	0,50	0,67	0,75	0,80
10	Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan		60		43	45	50	55	60	41	43	45	48	52	0,95	0,96	0,90	0,87	0,87
11	Persentase Realisasi Capaian RKPDes		70		50	55	60	65	70	44	47	50	55	60	0,88	0,85	0,83	0,85	0,86
12	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu		100		95	96	97	100	100	92	94	96	98	100	0,97	0,98	0,99	0,98	1,00
13	Persentase pelayanan perijinan tepat waktu		100		100	100	100	100	100	95	96	97	99	100	0,95	0,96	0,97	0,99	1,00
14	Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan		65		45	50	55	60	65	38	40	42	46	50	0,84	0,80	0,76	0,77	0,77
15	Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib		95		82	83	85	90	95	78	80	82	83	88	0,95	0,96	0,96	0,92	0,93

### **2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan**

Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Kecamatan Winong sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana. Pada tahun 2015 dan 2016 anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Winong sebagaimana tabel berikut.

**Tabel II.15**

**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN WINONG  
KABUPATEN PATI**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (dlm Ribuan)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (dlm Ribuan)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Angga	Reali
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	ran	sasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	79.080	95.600	96.900	139.664	171.982	79.080	90.525	96.900	133.947	166.163	100	94,69	100	97,3	100		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	63.063	85.486	37.766	63.743	99.363	63.063	85.486	37.766	63.743	99.363	100	100	100	100	100		
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	6.120	9.600	9.600	9.600	9.600	6.120	9.600	9.600	9.600	9.600	100	100	100	100	100		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (dlm Ribuan)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (dlm Ribuan)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	21.385	21.385	21.385	27.000	20.900	21.385	21.385	21.385	27.000	20.900	100	100	100	100	100		
Program Penataan Administrasi Kependudukan	95.380	95.860	104.260	95.460.	81.030.	95.380	95.860	104.260	95.460.	81.030.	100	100	100	100	100		
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	25.560	36.371	58.697	27.960	21.640	25.560	36.371	58.697	27.960	21.640	100	100	100	100	100		
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	5.000	-	-	15.825	-	5.000	-	-	15.825	-	100	0	0	100	=		
Program Peningkatan dan	0	0	6000	18.000	0	0	0	6000	18.000	0	0	0	100	100	0		



Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (dlm Ribuan)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (dlm Ribuan)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah																	
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	NA	10.811	14.597	15.000	18.130		10.811	14.597	15.000	18.130	NA	100	100	100	100		
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan dan Pelayanan Publik	NA	47.500	47.500	20.000	8.640		47.500	47.500	20.000	8.640	NA	100	100	100	100		

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Winong**

Tantangan pengembangan pelayanan kecamatan Winong merujuk pada tugas fungsi utama kecamatan yaitu koordinasi

- (i) penyelenggaraan pemerintahan,
- (ii) pelayanan publik, dan
- (iii) pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Winong kurun 2012-2017, maka tantangan pengembangan ke arah lima tahun yang akan datang (2017-2022) seagai berikut.

1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban.

Tantangan dalam memberikan rasa aman dalam hal ini menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui pengembangan keikutsertaan masyarakat dalam menjaga lingkungannya. Keberadaan lembaga posko keamanan lingkungan (Poskamling) yang selama ini sudah ada memerlukan upaya untuk mengembalikan peran dan fungsinya untuk ikut serta dalam menjaga ketentraman dan ketertiban. Selain itu keberadaan tenaga perlindungan masyarakat (Linmas) dapat dimanfaatkan untuk ikut serta dalam menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan.

2. Koordinasi bidang fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan

Tantangan ke depan adalah implementasi teknologi informasi untuk penyelenggaraan pemerintahan di era keterbukaan informasi, maka tantangan pengembangannya adalah bagaimana kecamatan menguatkan fasilitasi dan koordinasi lintas pelaku untuk menyediakan data sektoral kewilayahan yang akurat dan terbaru.

Peluang pengembangan ke depan perlu diprioritaskan optimalisasi pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat. Oleh karena itu tantangan sekaligus peluang pengembangannya adalah peningkatan kualifikasi sumber daya aparatur kecamatan.

3. Pelayanan Publik

Tantangan pembangunan nasional dalam RPJMN dimana seluruh daerah di Indonesia diprograman bergerak ke arah Smart City memberi tantangan khusus bagi kecamatan untuk menyelenggarakan pelayanan publik berbasis teknologi informasi menuju smart kecamatan (Kecamatan cerdas). Fokus pengembangan pelayanan kurun lima tahun ke depan adalah menuju kecamatan berstandar ISO untuk pelayanan publik.

4. Pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan

Tantangan dari RPJMN 2014-2019 adalah bagaimana menguatkan partisipasi masyarakat menuju tata kelola pemerintahan yang demokratis dan menguatkan kemandirian wilayah. Tantangan pengembangan layanan kecamatan kurun 2017-2022 lebih memerlukan fokus pengembangan dalam hal isu:

- a. Partisipasi masyarakat untuk menjaga pengendalian kualitas dan kuantitas sumber lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kegiatan rumah tangga dan kegiatan usaha.
- b. Partisipasi masyarakat untuk memenuhi rasio kebutuhan sarana sanitasi lingkungan untuk mengurangi resiko dampak kesehatan dikarenakan lingkungan pemukiman yang tidak sehat.